

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAH DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DENGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI
(Pada Organisasi Perangkat Daerah di Kota Serang)**

Euis Mardiyatul Fauziah

Magister Akuntansi Universitas Sultan Ageng Tritayasa

Euis21fauziah@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the Influence of Regional Financial Accounting Systems, Competence of the Government Aparatur, and Use of Information Technology on the Quality of Local Government Financial Reports with Internal Control Systems as moderating variables. The data used in this study is primary data. Methods of collecting data using questionnaires distributed to respondents. The questionnaire was distributed to 64 Serang City Government Organization employees involved in the process of preparing financial statements. The data analysis method used in this study is the Moderated Regression Analysis (MRA). The results of this study indicate that the influence of the Regional Financial Accounting System has a positive and significant effect on the quality of the Regional Government's Financial Statements, Competency of Government Officials does not have a positive and significant effect on the quality of the Regional Government's Financial Statements, and the Utilization of Information Technology has no positive and significant effect on the quality of the Government's Financial Statements. Area. The results of this study also indicate that the Internal Control System moderates the relationship between the Effects of the Regional Financial Accounting System, while the Internal Control System is not able to moderate the Effect of Competency of Government Apparatuses, and the Utilization of Information Technology on the Quality of Regional Government Financial Statements.

Keywords : Regional Financial Accounting System, Competence of Government Aparatur, Use of Information Technology, Quality of Local Government Financial Reports and Internal Control Systems.

PENDAHULUAN

Laporan keuangan yang berkualitas menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah laporan keuangan yang memiliki karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan serta dapat dipahami. Relevan yaitu informasi yang termuat di dalamnya dapat memengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Andal yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang material, menyajikan setiap fakta yang jujur, serta dapat diverifikasi. Dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Dapat dipahami dalam artian dapat dimengerti oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud. Hasil penelitian Roviyantie (2011) yang berjudul pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sumber daya manusia dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Selain itu hal yang mendasar memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah adalah penerapan sistem akuntansi berdasarkan standar akuntansi pemerintahan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintah melalui penyusunan dan

pengembangan standar akuntansi pemerintah. Penerapan standar akuntansi di dalam penyusunan laporan keuangan daerah salah satunya adalah sistem akuntansi. Menurut Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Keberadaan suatu system akuntansi menjadi sangat penting karena fungsinya dalam menentukan kualitas informasi pada laporan keuangan. Berkaitan dengan sistem akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan, hasil penelitian Wati, dkk (2014) dan Roviyantri (2011) menyatakan terdapat pengaruh system akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan. Sementara itu menurut penelitian Ihsanti (2014) sistem akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Fenomena menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) masih relatif sedikit (Sudiarianti, 2015). Masih sedikitnya LKPD yang memperoleh opini WTP di Indonesia menjadi suatu fenomena penting untuk dianalisis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) bertugas melakukan pemeriksaan keuangan berupa laporan keuangan pusat dan daerah yang berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dan BPK pun wajib memberikan opini terhadap laporan keuangan pemerintah tersebut.

Tabel 1
Opini BPK atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kota Serang tahun 2013-2017

No	Entitas	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1.	Kota Serang	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP

Sumber: banten.bpk.go.id (Di akses tanggal 28 oktober 2018)

Dari tabel 1 dapat terlihat Kota Serang pada beberapa tahun sejak tahun 2013-2016 mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan di tahun 2017 Kota Serang mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dikatakan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Banten, tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai oleh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Pemkot Serang ada beberapa catatan yang harus diperbaiki, diantaranya yaitu :

1. Penatausahaan persediaan belum tertib karena tidak melakukan pencatatan mutasi persediaan, tidak memiliki ruang penyimpanan yang memadai, dan nilai yang disajikan dalam laporan keuangan tidak sesuai dengan kebijakan akuntansi.
2. Kerjasama pemanfaatan aset berupa pasar dan tanah dengan pihak ketiga dengan nilai investasi kurang lebih sebesar Rp26,8 miliar belum menguntungkan pemerintah kabupaten/kota antara lain karena kerja sama tidak didukung dengan perjanjian dan penentuan bagi hasil tidak didasarkan perhitungan yang memadai.
3. Potensi pendapatan sebesar Rp2,2 miliar belum dipungut yang berasal dari sewa kantor, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, serta jasa kepelabuhanan.

Pengelolaan keuangan daerah yang sehat dalam rangka menciptakan *good governance* juga harus diikuti dengan sumber daya aparatur yang kompeten. Namun sudah menjadi permasalahan umum di instansi pemerintah daerah bahwa untuk penataan personil, sering kali dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan baik secara kuantitas maupun kualitas (cakap). Dari aspek kualitas penataan personil tidak mengikuti prinsip "the right man on the right place" (Fikri dkk, 2015). Hal ini sangat berkaitan dengan pengembangan organisasi yang hanya mempertimbangkan kewenangan sementara kualitas sumberdaya aparatur yang ada belum memenuhi kompetensi yang seharusnya dipenuhi (Aruan, 2003).

Sumberdaya manusia yang tidak memiliki kompetensi tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara efisien, efektif dan ekonomis. Dalam hal ini pekerjaan yang dihasilkan tidak akan tepat waktu dan terdapat pemborosan waktu serta tenaga (Wati dkk, 2014). Keberadaan sumberdaya manusia dalam suatu instansi merupakan aset yang berharga bagi instansi itu sendiri. Keberhasilan suatu instansi ditentukan pada kualitas orang-orang yang berada di dalamnya. Sumberdaya manusia akan bekerja secara optimal jika instansi dapat mendukung kemajuan karir mereka dengan

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAH DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DENGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI
(Pada Organisasi Perangkat Daerah di Kota Serang)**

melihat apa sebenarnya kompetensi mereka (Humairoh, 2013). Kompetensi aparatur merupakan faktor terpenting dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas karena yang menerapkan SAP dan SPIP adalah manusia (Indriasih, 2014). Penelitian mengenai kompetensi aparatur (SDM) telah dilakukan oleh Indriasari dan Nahartyo (2008) dalam Sukmaningrum (2012), yang hasilnya menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia, tidak mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah secara signifikan, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil yang sama ditunjukkan oleh Sukmaningrum (2012) bahwa kompetensi Sumberdaya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Sedangkan hasil yang berbeda ditunjukkan oleh Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) dalam Sukmaningrum (2012) menunjukkan sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, tetapi tidak signifikan terhadap ketepatanwaktuan. Sedangkan pemanfaatan TI berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan dan ketepatanwaktuan.

Teknologi Informasi meliputi komputer (mainframe, mini, micro), perangkat lunak (software), database, jaringan (*internet*), *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson et al., 2000 dalam Arfianti, 2011). Jogiyanto (2007) menyatakan bahwa sistem informasi merupakan seperangkat komponen yang saling berhubungan yang berfungsi mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pembuatan keputusan dan pengawasan dalam organisasi. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap peningkatan keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah (Darwanis dan Mahyani, 2009). Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan (Karmila dkk, 2014). Hasil penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya adalah penelitian (Prpto, 2010) yang menemukan bukti empiris bahwa Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pemanfaatan teknologi informasi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, karena teknologi informasi yang tidak atau belum dimanfaatkan secara optimal, kurangnya ketersediaan komputer yang memadai, penggunaan jaringan internet yang belum optimal, serta pengimplementasian teknologi informasi yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga implementasi teknologi informasi menjadi sia-sia dan semakin mahal dan tidak dapat mendukung penyajian pelaporan keuangan yang handal.

Suatu instansi juga membutuhkan suatu Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang kuat untuk mencapai tujuan suatu organisasi (Wakhyudin dalam Fikri, 2015). Sistem Pengendalian Internal yang kuat tentunya akan meningkatkan kualitas laporan keuangan OPD. Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas informasi pelaporan keuangan di SKPD Kabupaten Gianyar (Mahaputra dan Putra, 2014). Namun terdapat beberapa penelitian yang menunjukkan hasil yang berbeda seperti penelitian yang dilakukan oleh Karmila dkk (2014), menunjukkan bahwa SPIP tidak berpengaruh terhadap LKPD. Sistem pengendalian intern akuntansi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah (Anggraeni dan Riduwan, 2014).

Berdasarkan temuan dan fenomena yang sudah diuraikan diatas maka penelitian ini mengacu pada penelitian Arista (2018). Hal ini perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menguji variabel yang sama digunakan oleh penelitian sbelumnya namun penelitian ini hanya menambahkan Pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai variabel independen dan mengganti sampel atau objek penelitian pada Organisasi Pemerintah Daerah Kota Serang yang dimungkinkan memberi hasil yang berbeda jika dilakukan di instansi daerah yang berbeda.

TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Stewardship

Teori *Stewardship* dikemukakan oleh Donaldson dan Davis (1991) yang menggambarkan situasi dimana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori tersebut mengasumsikan bahwa adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Kesuksesan organisasi menggambarkan maksimalisasi utilitas kelompok ini yang pada akhirnya akan memaksimumkan kepentingan individu yang ada dalam kelompok organisasi.

Teori *Stewardship* atau pengabdian berasumsi bahwa manusia pada hakikatnya mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, dapat dipercaya, berintegritas tinggi dan memiliki kejujuran. Teori ini memandang manajemen sebagai pihak yang mampu melaksanakan tindakan yang sebaik-baiknya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan *stakeholders*. Konsep teori ini didasarkan pada asas kepercayaan pada pihak yang diberikan wewenang, dimana manajemen dalam suatu organisasi dicerminkan sebagai *good steward* yang melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasannya secara penuh tanggung jawab.

Teori *stewardship* dapat diterapkan pada penelitian akuntansi organisasi sektor publik yang sejak awal perkembangannya, akuntansi organisasi sektor publik telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara stewards dengan principals. Akuntansi sebagai penggerak (*driver*) berjalannya transaksi bergerak kearah yang semakin kompleks dan diikuti dengan tumbuhnya spesialisasi dalam akuntansi organisasi sektor publik. Kondisi semakin kompleks dengan bertambahnya tuntutan akan akuntabilitas pada organisasi sektor publik, principal semakin sulit untuk melaksanakan sendiri fungsi-fungsi pengelolaan.

Pemisahan antara fungsi kepemilikan dengan fungsi pengelolaan menjadi semakin nyata. Berbagai keterbatasan, pemilik sumber daya (*capital suppliers/principals*) mempercayakan (*trust = amanah*) pengelolaan sumber daya tersebut kepada pihak lain (*steward = manajemen*) yang lebih *capable* dan siap. Kontrak hubungan antara *steward* dan *principals* atas dasar kepercayaan bertindak kolektif sesuai dengan tujuan organisasi, sehingga model yang sesuai pada kasus organisasi sektor publik adalah *stewardship theory*.

Objek penelitian ini adalah bagian dari organisasi sektor publik yaitu organisasi pemerintah daerah Kota Serang. Penelitian ini akan menguji efek pembelajaran teori *stewardship* pada Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Aparatur Pemerintah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Sistem Pengendalian Internal sebagai Variabel Moderasi. Implikasi teori *stewardship* dengan penelitian ini adalah dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan cara melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat, membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi pemerintahan, pelayanan publik kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal.

Untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut maka steward (pembuat laporan keuangan) mengarahkan semua kemampuan dan keahliannya dengan mengefektifkan pengendalian internal dan teknologi informasi untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.

Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD harus disusun atau dihasilkan dari sebuah sistem akuntansi pemerintahan daerah yang handal, yang bisa dikerjakan secara manual maupun menggunakan aplikasi komputer. menurut Permendagri No. 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sistem akuntansi pemerintah daerah adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Hasil penelitian Wati (2014) sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka hipotesis selanjutnya dirumuskan sebagai berikut :

H₁ : Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kompetensi Aparatur adalah kemampuan seseorang atau individu, dalam suatu organisasi atau lembaga untuk melaksanakan fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.

Kompetensi Aparatur merupakan salah satu faktor penting dalam menghasilkan laporan keuangan pemerintah, karena yang menjalankan SAP dan SPIP adalah sumber daya manusia. Sebaik apapun sistem dan peraturan yang dibuat tapi jika Kompetensi SDM yang menjalankan kurang memadai maka hasilnya tidak akan sesuai dengan apa yang diharapkan (Irwan 2011).

Hasil Penelitian Indriasih (2014) yang menunjukkan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka hipotesis selanjutnya dirumuskan sebagai berikut :

H₂ : Kompetensi Aparatur Pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam dunia modern saat ini, penggunaan teknologi informasi menjadi suatu keharusan. Teknologi informasi dapat membantu sumber daya manusia dalam mengelola keuangan. Meskipun laporan keuangan adalah produk yang dihasilkan oleh sumber daya manusia dibidang akuntansi tapi memanfaatkan teknologi bisa meminimalisir kesalahan dari manusia itu sendiri.

Menurut Hamzah (2009) dalam Winidyaningrum dan Rahmawati (2010: 7), pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen, dan proses kerja secara elektronik, dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negeri ini.

Pengolahan data menjadi suatu informasi dengan bantuan komputer jelas akan lebih meningkatkan nilai dari informasi yang dihasilkan (Hanafi, 2013: 89). Maka dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi akan lebih meningkatkan kualitas laporan keuangan. Maka dari pemerintah daerah diharuskan untuk memanfaatkan kemajuan teknologi yang berguna untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan daerah sesuai dengan peraturan pemerintah No.56 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Hasil Penelitian (Karmila dkk, 2014) Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka hipotesis selanjutnya dirumuskan sebagai berikut :

H₃ : Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Sistem Pengendalian Internal sebagai variabel moderasi.

Menurut Erlina & Rasdianto (2013), sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal akan berjalan dengan baik apabila di dukung dengan penerapan sistem akuntansi yang berjalan secara efektif. Dengan mengoptimalkan Sistem Pengendalian diharapkan pengendalian intern semakin efektif sehingga dapat menjadi mediator dalam mengatasi permasalahan rendahnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pengawasan dalam sistem pengendalian internal diarahkan antara lain untuk

mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian Arista (2018) menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal tidak memoderasi hubungan antara Penerapan Sistem Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka dibuatlah hipotesis sebagai berikut:

H₄ : Sistem Pengendalian Internal memoderasi pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Sistem Pengendalian Internal sebagai variabel moderasi.

Sumber Daya Aparatur Pemerintah yang tidak berkompeten dalam menyusun laporan keuangan akan memengaruhi kualitas laporan keuangan. Sumber Daya Aparatur yang gagal memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada ketidaksesuaian laporan keuangan yang dibuat dengan standar pemerintah (Nurillah, 2014). Tidak hanya itu kesalahan dan kekeliruan akan terjadi dalam laporan keuangan yang telah dibuat.

Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 pasal 10 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menjelaskan bahwa pemerintah harus melakukan penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen sehingga ditempatkan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Penempatan sumber daya manusia sesuai dengan keahliannya dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Selain itu pemerintah harus melakukan pelatihan seiring dari perkembangan ilmu sehingga kompetensi aparatur pemerintah akan meningkat. Jadi kompetensi aparatur yang berkualitas dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dapat diperkuat pengendalian internal.

Hasil penelitian Fikri (2016) menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal dapat memoderasi pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka hipotesis selanjutnya dirumuskan sebagai berikut :

H₅ : Sistem Pengendalian Internal memoderasi pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai variabel moderasi.

Menurut Jurnal dan Supomo (2002) dalam Trisaputra (2013), Pemanfaatan Teknologi Informasi adalah tingkat integrasi teknologi informasi pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi yang terdiri dari:

1. Bagian akuntansi/keuangan memiliki komputer, yang cukup untuk melaksanakan tugas,
2. Jaringan internet telah terpasang di unit kerja,
3. Jaringan komputer telah dimanfaatkan sebagai penghubung antar unit kerja dalam pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan,
4. Proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputersisasi,
5. Pengolahan data transaksi keuangan menggunakan software yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
6. Laporan akuntansi dan manajerial dihasilkan dari sistem yang terintegrasi,
7. Adanya jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur
8. Peralatan yang usang atau rusak di data dan diperbaiki tepat pada waktunya.

Melihat penjelasan tersebut bahwa Teknologi informasi dapat menunjang kegiatan organisasi. Teknologi informasi juga dapat meningkatkan akurasi dari informasi laporan keuangan.

Sebuah sistem Pengendalian intern yang baik akan didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi yang baik pula. Pengendalian intern juga bertujuan agar organisasi tetap memanfaatkan teknologi dalam memberikan informasi terkait kegiatan organisasi dikarenakan pengendalian intern sudah terintegrasi dengan teknologi. Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern, pemerintah diharus melakukan tindak pencegahan terhentinya operasi komputer, melakukan pengendalian atas perangkat lunak sistem berupa pembatasan akses ke perangkat lunak sesuai dengan tanggung jawab pekerjaan, pemantauan atas akses dan penggunaan

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAH DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DENGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI
(Pada Organisasi Perangkat Daerah di Kota Serang)**

perangkat lunak sistem, serta pengendalian atas perubahan yang dilakukan terhadap perangkat lunak sistem. Tindakan pengendalian tersebut dilakukan agar teknologi informasi digunakan secara optimal. Dengan demikian adanya pemanfaatan teknologi informasi serta diperkuat dengan pengendalian intern maka akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Hasil penelitian Pratiwi et al. (2015) menemukan bahwa Pemanfaatan Teknologi dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah secara simultan dan parsial. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka hipotesis selanjutnya dirumuskan sebagai berikut :

H₆ : Sistem Pengendalian Internal memoderasi pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang akan digunakan adalah dengan cara mengukur dan menganalisis Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Aparatur Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Serang. Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kausal dimana desain kausal berguna untuk menganalisis bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lain (Sugiyono,2013). Sedangkan metode yang digunakan adalah metode kuantitatif, yaitu metode yang di gunakan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan antar variabel satu dengan yang lainnya (Sugiyono,2013). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan salah satu teknik pengambilan data secara langsung dengan menggunakan media kuesioner dengan cara penyampaian kuesioner secara langsung ke semua OPD Kota Serang.

Sekaran (2011) menyatakan bahwa populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek dan subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah bagain pengelolaan keuangan pada 32 OPD Kota Serang yang meliputi 13 dinas, 6 badan, 3 kantor (kantor kesatuan bangsa dan politik, kantor perpustakaan dan arsip daerah, kantor satuan polisi pamong praja), 6 kecamatan, Sekretariat daerah, sekretariat DPRD, Inspektorat dan KORPI. Sampel yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Kasubbag Keuangan dan Bendahara keuangan. Masing-masing OPD diambil dua responden Jadi total sampel dalam penelitian ini yaitu 64 sampel. Penyampelan atas responden dilakukan secara purposive sampling.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini *Library research*, yaitu mencari dan mengumpulkan data dari literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti yaitu dengan cara mengumpulkan bahan-bahan berupa teori-teori yang berasal dari literature-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dimana data ini diperoleh melalui dokumen-dokumen, buku dan tulisan ilmiah lainnya, dengan maksud untuk melengkapi data primer yang ada dilapangan. *Filed research*, yaitu penelitian yang dilakukan dimana datanya diperoleh dengan cara kuesioner, adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi serangkaian pertanyaan tertulis kepada responden.

Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini dikelompokan sebagai berikut :

a. Variabel Independen (bebas)

Yaitu variabel yang menjadi sebab timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2013:59).

Variabel independen dalam penelitian ini adalah Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur dan Pemanfaatan Teknologi Informasi.

b. Variabel Dependen (Terikat)

Yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2013:59). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

c. Variabel Moderasi

Variabel moderasi adalah variabel yang bersifat memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen). Salah satu ciri terpenting adalah variabel ini tidak dipengaruhi variabel independen. Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik biasa digunakan dalam penelitian dengan tujuan untuk menunjukkan serangkaian asumsi-asumsi dasar yang dibutuhkan dan untuk memastikan data yang digunakan berdistribusi secara normal serta layak digunakan dalam persamaan model regresi (Ghozali, 2011). Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, uji dan heteroskedastisitas.

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Suatu model regresi yang baik adalah dimana semua datanya berdistribusi normal atau mendekati normal. Dalam penelitian ini, distribusi normal dideteksi dengan analisis normal probability plot dan analisis statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov Z (1-Sample K-S)*. distribusi normal yaitu jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya serta jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih dari 0,05.

Asumsi hipotesis pengujian yang digunakan dalam uji *Kolmogorov-Smirnov* adalah sebagai berikut :

- Hipotesis Nol (H_0) : Data terdistribusi secara normal
 Hipotesis Alternatif (H_a) : Data tidak terdistribusi secara normal

Tabel 2
Uji Normalitas dengan *Kolmogorov-Smirnov Test*
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		64
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	1,65525529
Most Extreme Differences	Absolute	0,075
	Positive	0,041
	Negative	-0,075
Kolmogorov-Smirnov Z		0,598
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,867

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Hasil Output SPSS 21

Berdasarkan tabel 2 pada uji normalitas data bahwa besarnya nilai signifikansi (*Asymp Sig. 2-tailed*) adalah sebesar 0,867 atau 86,7%, hal ini berarti data residual terdistribusi secara normal karena signifikannya berada di atas 0,05 atau 5% sehingga hipotesisnya menerima Hipotesis Nol (H_0) data terdistribusi secara normal dan menolak Hipotesis Alternatif (H_a) data tidak terdistribusi secara normal.

Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas yaitu adanya hubungan linear antar variabel independen dalam model regresi. Metode pengujian yang bisa digunakan yaitu melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF) pada model regresi, membandingkan nilai koefisien determinasi individual (r^2). Nilai yang umum dipakai untuk menunjukkan tidak adanya multikolinearitas adalah nilai Tolerance > 0,10 dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) < 10 (Gozali, 2011). Adapun hasil dari uji multikolinearitas dari penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAH DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DENGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI
(Pada Organisasi Perangkat Daerah di Kota Serang)**

Tabel 3
Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

	Model	Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Sis. Ak. Keu. Daerah (X1)	0,866	1,154
	Kom. Ap. Pemerintah (X2)	0,876	1,142
	Pem. Tek. Informasi (X3)	0,968	1,033

a. Dependent Variable: Kualitas Lap. Keu. (Y)

Sumber: Hasil Output SPSS 21.0

Dari tabel 3 dapat dilihat bahwa nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) diperoleh < 10 , maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat multikolinieritas, maka dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan tidak mengandung gejala multikolinieritas dan *tolerance* menunjukkan $>$ dari 0,10. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antara variabel dalam model regresi tersebut.

Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Dalam asumsi klasik untuk menguji apakah terjadi pelanggaran terhadap heterokedastisitas dapat dilakukan dengan UJI PARK. Uji ini dikembangkan oleh Park pada tahun 1966, pengujian dilakukan dengan meregresikan nilai log residual kuadrat sebagai variabel dependen dengan variabel independennya. Metode uji Park yaitu dengan meregresikan nilai logaritma natural dari residual kuadrat ($\text{Ln}e^2$) dengan variabel independen. Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

Ho : tidak ada gejala heteroskedastisitas

Ha : ada gejala heteroskedastisitas

Ho diterima bila Signifikansi $> 0,05$ berarti tidak terdapat heteroskedastisitas dan Ho ditolak bila Signifikansi $< 0,05$ yang berarti terdapat heteroskedastisitas.

Berikut ini adalah hasil perhitungan Heterokedastisitas dengan uji *park* adalah sebagai berikut :

Tabel 4
Uji Heterokedastisitas dengan Uji Park
Coefficients^a

	Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0,638	4,467		0,143	0,887
	Sis. Ak. Keu. Daerah (X1)	-0,087	0,103	-0,171	-0,849	0,403
	Kom. Ap. Pemerintah (X2)	-0,010	0,157	-0,013	-0,065	0,948
	Pem. Tek. Informasi (X3)	0,106	0,148	0,138	0,716	0,480

a. Dependent Variable: LNRes1

Sumber: Hasil Output SPSS 21.0

Berdasarkan tabel 4 diketahui bahwa nilai sig $> \alpha$ (0,05) semua variabel bersifat homoskedastisitas yang dibuktikan dengan nilai signifikansi uji *park*. Semua nilai probabilitas (sig)

adalah lebih besar dari 0.05 dengan demikian bahwa dalam model tersebut Ho diterima Ha ditolak sehingga tidak ada gejala heteroskedastisitas.

Uji Keباikan Model (*Goodness of Fit Model*)

Uji *goodness of fit* merupakan pengujian kecocokan atau keباikan sesuai antara hasil pengamatan (frekuensi pengamatan) tertentu dengan frekuensi yang diperoleh berdasarkan nilai harapannya (frekuensi teoritis). Adapun indikator dari *goodness of fit* dapat dilihat dari koefisien determinasinya (*Adjusted R-Square*)

Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R-Square*)

Untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen, digunakan uji Koefisien Determinasi (KD). Berikut merupakan hasil perhitungan R^2 untuk mengetahui besarnya pengaruh Maksimalisasi kekayaan, Informasi Akuntansi, hubungan audit internal dengan eksternal, Informasi netral, independensi audit internal terhadap pembuatan keputusan investor individu dengan menggunakan program aplikasi SPSS 21.0.

Tabel 5
Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,785 ^a	0,616	0,609	2,05199

a. Predictors: (Constant), Pem. Tek. Informasi (X3), Kom. Ap.

Pemerintah (X2), Sis. Ak. Keu. Daerah (X1)

Sumber: Hasil Output SPSS 21.0

Berdasarkan tabel 5 diperoleh nilai *R Square* sebesar 0,616 variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X₁), Kompetensi Aparatur Pemerintah (X₂), Pemanfaatan Teknologi Informasi bersama-sama menjelaskan variabilitas dari Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) adalah sebesar 61,6% sedangkan sisanya 38,4% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Untuk mengetahui seberapa jauh Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Aparatur Pemerintah, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi secara simultan mempengaruhi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah maka dilakukan uji F adalah sebagai berikut :

Tabel 6
Uji F / Analisis Model
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	28,540	3	9,513	3,047	0,035 ^b
Residual	187,319	60	3,122		
Total	215,859	63			

a. Dependent Variable: Kualitas Lap. Keu. (Y)

b. Predictors: (Constant), Pem. Tek. Informasi (X3), Kom. Ap. Pemerintah (X2), Sis. Ak. Keu. Daerah (X1)

Sumber: Hasil Output SPSS 21.0

Dari perhitungan di atas diperoleh Fhitung sebesar 3,047 dan nilai Ftabel pada tarif $\alpha = 5\%$ dan derajat pembilang $m = 3$ dan derajat penyebut digunakan $n-m-1 = 64-3-1 = 60$ diperoleh F_{tabel} sebesar 2,758 atau $3,047 > 2,758$ diterima, artinya Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Aparatur Pemerintah, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi secara simultan mempengaruhi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAH DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DENGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI
(Pada Organisasi Perangkat Daerah di Kota Serang)**

Selain itu nilai probability sebesar 0,035 yang berarti angka ini lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% atau $0,03 < 0,05$ menunjukkan bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Aparatur Pemerintah, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Hasil Moderated Regression Analysis (MRA)

Moderated Regression Analysis (MRA) atau uji interaksi adalah aplikasi khusus regresi berganda linear dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen) (Ghozali, 2011:229).

Untuk melihat apakah variabel sistem pengendalian internal (Z) mampu memperkuat atau memperlambat pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_1), Kompetensi Aparatur Pemerintah (X_2), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_3) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) digunakan analisis MRA (*Moderating Regression Analysis*)

Tabel 7
Hasil uji Moderated Regression Analysis (MRA)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-127,599	63,928		-1,996	0,051
Sis. Ak. Keu. Daerah (X1)	2,702	1,320	3,488	2,047	0,045
Kom. Ap. Pemerintah (X2)	1,208	2,349	1,184	0,514	0,609
Pem. Tek. Informasi (X3)	1,969	1,655	1,990	1,190	0,239
Sis. Peng. Internal (Z)	7,248	2,816	6,689	2,574	0,013
X1 * Z	-0,122	0,058	-4,797	-2,099	0,040
X2 * Z	-0,042	0,104	-1,339	-0,409	0,684
X3 * Z	-0,096	0,075	-2,776	-1,280	0,206

a. Dependent Variable: Kualitas Lap. Keu. (Y)

Sumber: Hasil Output SPSS 21.0

Pengujian Hipotesis 1

Hasil pengujian hipotesis 1 penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan tabel 7 pada uji statistik di atas, maka diperoleh nilai t_{hitung} untuk variabel penerapan sistem akuntansi keuangan daerah adalah positif sebesar 2,047 sedangkan t_{tabel} pada taraf $\alpha = 5\%$ dengan $df = 64 - 3 = 61$, yaitu t_{tabel} sebesar 2,000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,047 > 2,000$) dan $sig < 0,05$ ($0,04 < 0,05$), maka H_a diterima artinya bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Serang (Hipotesis 1 diterima).

Pengujian Hipotesis 2

Hasil pengujian hipotesis 2 kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan tabel 7 pada uji statistik di atas, maka diperoleh nilai t_{hitung} untuk variabel kompetensi aparatur pemerintah adalah positif sebesar 0,514 sedangkan t_{tabel} pada taraf $\alpha = 5\%$ dengan $df = 64 - 3 = 61$, yaitu t_{tabel} sebesar 2,000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0,514 < 2,000$) dan $sig > 0,05$ ($0,61 > 0,05$), maka H_a ditolak dan H_0 diterima artinya bahwa kompetensi aparatur pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Serang (Hipotesis 2 ditolak).

Pengujian Hipotesis 3

Hasil pengujian hipotesis 3 pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan tabel 7 pada uji statistik di atas, maka diperoleh nilai t_{hitung} untuk variabel pemanfaatan teknologi informasi adalah positif sebesar 1,190 sedangkan t_{tabel} pada taraf $\alpha = 5\%$ dengan $df = 64 - 3 = 61$, yaitu t_{tabel} sebesar 2,000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($1,190 < 2,000$) dan $sig > 0,05$ ($0,24 > 0,05$), maka H_a ditolak dan H_0 diterima artinya bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Serang (Hipotesis 3 ditolak).

Pengujian Hipotesis 4

Hasil pengujian hipotesis 4 sistem pengendalian internal memoderasi pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan tabel 7 pada uji statistik di atas, maka diperoleh nilai t_{hitung} untuk sistem pengendalian internal memoderasi pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan adalah sebesar -2,099 sedangkan t_{tabel} pada taraf $\alpha = 5\%$ dengan $df = 64 - 3 = 61$, yaitu t_{tabel} sebesar -2,000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($-2,099 > -2,000$) dan $sig < 0,05$ ($0,04 < 0,05$), maka H_a diterima artinya bahwa pengendalian internal mampu memoderasi pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan Kota Serang (Hipotesis 4 Diterima).

Pengujian Hipotesis 5

Hasil pengujian hipotesis 5 sistem pengendalian internal memoderasi pengaruh kompetensi aparatur pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan tabel 7 pada uji statistik di atas, maka diperoleh nilai t_{hitung} untuk sistem pengendalian internal memoderasi pengaruh kompetensi aparatur pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan adalah sebesar -0,409 sedangkan t_{tabel} pada taraf $\alpha = 5\%$ dengan $df = 64 - 3 = 61$, yaitu t_{tabel} sebesar -2,000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-0,197 < -2,000$) dan $sig > 0,05$ ($0,68 > 0,05$), maka H_a ditolak dan H_0 diterima artinya bahwa sistem pengendalian internal tidak mampu memoderasi pengaruh kompetensi aparatur pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan Kota Serang (Hipotesis 5 Ditolak).

Pengujian Hipotesis 6

Hasil pengujian hipotesis 5 sistem pengendalian internal memoderasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan tabel 7 pada uji statistik di atas, maka diperoleh nilai t_{hitung} untuk sistem pengendalian internal memoderasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah sebesar -1,280 sedangkan t_{tabel} pada taraf $\alpha = 5\%$ dengan $df = 64 - 3 = 61$, yaitu t_{tabel} sebesar -2,000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-1,280 < -2,000$) dan $sig > 0,05$ ($0,21 > 0,05$), maka H_a ditolak dan H_0 diterima artinya bahwa sistem pengendalian internal tidak mampu memoderasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Serang (Hipotesis 6 Ditolak).

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris akan adanya pengaruh variabel audit efektivitas, kebijakan auditor, profesi auditor eksternal, profesi ahli lain, hambatan, administrasi publik terhadap kinerja auditor opini audit *going concern*. Berdasarkan data yang diperoleh dan analisis yang telah dilakukan, maka ditarik kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Serang. Hasil ini mendukung hipotesis pertama yang diajukan (diterima). Tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kompetensi aparatur pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Serang. Hasil ini mendukung hipotesis kedua yang diajukan (ditolak). Tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Serang. Hasil ini

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAH DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DENGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI
(Pada Organisasi Perangkat Daerah di Kota Serang)**

mendukung hipotesis ketiga yang diajukan (ditolak). Pengendalian internal mampu memoderasi pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan Kota Serang. Hasil ini mendukung hipotesis keempat yang diajukan (diterima). Pengendalian internal tidak mampu memoderasi pengaruh kompetensi aparatur pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan Kota Serang. Hasil ini mendukung hipotesis kelima yang diajukan (ditolak).cPengendalian internal tidak mampu memoderasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan Kota Serang. Hasil ini mendukung hipotesis keenam yang diajukan (ditolak).

Saran

Dengan memperhatikan hasil analisis dan pengujian yang telah disimpulkan diatas, smaka penulis mencoba memberikan saran: Pertama, Bagi peneliti berikutnya diharapkan menggunakan metode survey dengan wawancara langsung dalam pengisian kuesioner, sehingga dalam pengisian sesuai dengan kondisi yang sebenar-benarnya. Kedua, Bagi peneliti selanjutnya, dikarenakan masih terdapat banyak faktor-faktor lain yang berpengaruh di luar model penelitian, diharapkan dapat meneliti dengan menggunakan variabel-variabel lain di luar variabel ini, serta dapat menambahkan variabel independen lainnya, disarankan menggunakan populasi dan sampel yang berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung teori dan konsep yang diterima secara umum.Ketiga, Saran untuk perguruan tinggi lebih mengembangkan keilmuan pendalaman materi maupun skill, atau bisa juga mengadakan seminar yang berhubungan dengan kualitas laporan keuangan dilembaga pemerintahan. Keempat, Bagi pemerintah daerah khususnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Serang agar dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pegawai/staf sub bagian keuangan/akuntansi untuk mengikuti berbagai pelatihan-pelatihan dan diklat-diklat mengenai sistem akuntansi keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Andini Dewi 2015. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD Kabupaten Lawang Sumatra Selatan. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi & Manajemen* 5 (1), vol.24, No.1.
- Darwanis dan Mahyani, Dwi D.2009. Kapasitas Sumber Daya Manusia Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Keterandalan laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi* vol 2 No 2 juli 2009 Hall 133-151.
- Fikri, Ali. 2016. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderating (Studi pada SKPD Pemerintah Provinsi NTB). *Jurnal Penelitian. Universitas Mataram, NTB.*
- Ghozali, Imam 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Cetakan IV. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ghozali, Imam 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Indriasari, D., & Nahartyo, E. 2008. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia,Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir). *Jurnal SNA. Pontianak.*
- Jensen, M.C. dan W.H. Meckling. 1976. Theory of The Firm: Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Jurnal of Finansial Economics*, Vol. 3, No.4, Hal. 305-360. Karmila. Tanjung, A.R. dan Darlis, E. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia,Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Sorot* Vol. 9 No.1 Lembaga Penelitian Universitas Riau.ISSN 1907- 364X.

- Komarasari, W. 2016. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Daerah (Pada SKPD Kabupaten Bantul Bagian Akuntansi dan Keuangan). *Jurnal Akuntansi Sektor Publik* 1-12.
- Mathindas, R, 2002. *Managemen SDM Lewat Konsep Ambisi, Kenyataan dan Usaha*, Edisi II Grafiti. Jakarta.
- Nugraheni, Purwaniati dan Subaweh, Imam, 2008. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuanga, *Jurnal Ekonomi Bisnis*, No. 1 Vol.13, April 2008, hal 48-58.
- Nuryanto, Muh dan Nunuy N. Afiah. The Impact of Apparatus Competence, Information Technology Utilization and Internal Control on Financial Statement Quality (Study on Local Government of Jakarta Province - Indonesia) *Woird Review of Business Researh* Vol.3 No.4 Issue Pp. 157-171
- Nordiawan, Dedi. 2010. Akuntansi Sektor Publik. Salemba Empat. Jakarta.
- , Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
- , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- , Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
- Setyowati, L., Isthika, W., & Pratiwi, R. D. 2016. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang. *Jurnal Akuntansi Sektor Publik* (1), 179-192.
- Santoso, Singgih. 2000. Latihan SPSS Statistik Parmetik. Gramedia. Jakarta.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Bisnis. Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Alfabeta. Bandung.
- Supomo, Bambang dan Nur Indrianto. Metode Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen. Fakultas Ekonomi & Bisnis UGM. Yogyakarta, 2013.
- Wati, K. Desiana 2014. Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng Provinsi Bali. *Jurnal Akuntansi & Manajemen*. Volume 2 Nomor 1 Tahun 2014.